

## BAB II

### 2.1 Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Demi memperkuat dalam melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan peneliti terdahulu sebagai acuan dan referensi untuk mendukung dan mempermudah dalam menentukan variabel-variabel. Berikut merupakan penelitian terdahulu dalam penelitiannya :

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian serta Hasil dan Analisis
1	Lilis Setyowatidan Yohana Kus Suparwati “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD, Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”	-Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia  -Variabel independen: 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Pendapatan Asli Daerah	Analisis persamaan regresi dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) dan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda hasil dari penelitian menyebutkan bahwa :  -Pertumbuhan ekonomi (PE) terbukti tidak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM)  -Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ) melalui pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM)  -Dana Alokasi Umum terbukti

			<p>berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ) melalui pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM)</p> <p>-Dana Alokasi Khusus terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)melalui pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM)</p>
2	<p>Nizar Firmansah</p> <p>Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota di Provinsi Banten</p>	<p>Variabel dependen:</p> <p>Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Variabel independen :</p> <p>1-Dana Perimbangan</p> <p>2- Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>3-Kemiskinan</p> <p>4-Belanja Modal</p>	<p>Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa :</p> <p>-Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM</p> <p>-Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM</p> <p>-Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM</p> <p>Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM</p>
3.	<p>DecaPitron Lugastoro</p> <p>Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>-Variabel dependen:</p> <p>Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa :</p>

		<p>-Variabel independen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Asli Daerah</li> <li>2-Dana Alokasi Umum</li> <li>3-Dana Alokasi Khusus</li> <li>4-Dana Bagi Hasil</li> <li>5-Pertumbuhan Ekonomi</li> </ol>	<p>-Rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>-Rasio DAU dan Belanja Modal terhadap belanja modal mempunyai pengaruh negative signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>-Rasio DBH dan Belanja Modal terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p>
4	<p>Siska Puspita Dewidan Suyanto</p> <p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Aloasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>-Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>-Variabel independen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>2- Pendapatan Asli Daerah</li> <li>3-Dana Alokasi Umum</li> <li>4-Dana Alokasi Khusus</li> </ol>	<p>Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa :</p> <p>Secara simultan pertumbuhan ekonomi ,Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal</p> <p>-Secara parsial pertumbuhan ekonomi ,Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana</p>

			Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal
5	Denni Sulistiomirza Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabelindependen : 1- Pertumbuhan Ekonomi 2-Kemiskinan 3-Belanja Modal	Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa : - Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan - Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan - Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan
6	Ginang Budhi Utomo Faktor- Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta Tahun 2004-2013	Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel independen : 1-Dana Perimbangan 2- Pendapatan perkapita 4-Belanja Modal	Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa : - Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM - pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM - belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM

7	<p>EkoHartanto</p> <p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Provinsi Riau</p>	<p>Variabel dependen : Pengeluaran pemerintah</p> <p>Variabel Independen : 1-Pendapatan Asli Daerah 1- JumlahPenduduk 2-Dana AlokasiUmum 3- Dana AlokasiKhusus 4- Dana BagiHasil</p>	<p>Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota Riau</li> <li>-Jumlah Penduduk berpengaruh negative terhadap pengeluaran pemerintah</li> <li>-Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah</li> <li>- Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah</li> <li>- Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah</li> </ul>
---	---	--	--

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

Menurut Sunarno dan Eka R (2006) indeks pembangunan manusia (IPM) untuk mengukur tingkat pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, komponen yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Menurut Mooris, keterkaitan pembangunan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) mampu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui tiga indikator : tingkat harapan hidup, angka kematian, tingkat melek huruf, dan tingkat pendapatan riil perkapita berdasarkan daya beli masing – masing negara (Lincoln,2004,37). Pada tahun 1992 Badan Pusat Statistik mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut indikator susenas inti (*core Susenas*), indikator tersebut adalah: Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertisasi , ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses ke media massa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) mempunyai Pruang lingkup yang lebih sempit, hanya mengukur sebagian dari keadaan pembangunan manusia yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli. Indikator tersebut dijadikan sebagai indikator-indikator yang paling layak untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan jangka panjang (BPS-Bappenas-UNDP, 2001).

### **2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto**

Menurut Tavip A. Rayanto (2002) jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ada jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu daerah pada saat periode tertentu. Secara kuantitatif merupakan nilai barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga berlaku (*at current price*) dan atas dasar harga konstan (*at constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengukur besaran pembangunan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi, sementara PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi riil atau perubahan volume produksi.

PDRB sebagai neraca regional dimana ukurannya dapat dipisahkan sebagai PDRB sektoral pada sisi kiri dan PDRB menurut penggunaan pada sisi kanan. Manfaat PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai ukuran pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas regional. Kemampuan pengelolaan pembangunan ekonomi yang tinggi disuatu daerah akan berdampak terhadap kemakmuran masyarakat. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Nilai PDRB yang dihasilkan oleh masing – masing daerah dan tergantung pada potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan teknologi (faktor produksi) di daerah. Ditinjau dari aspek spasial, analisis antar regional akan memberikan gambaran

perbedaan pola tentang hasil-hasil pembangunan ekonomi antar kabupaten.

Penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaan kepemilikan sumber daya alam, kondisi infrastruktur, dan faktor produksi yang tersedia. Akibat faktor tersebut menjadikan setiap wilayah akan menimbulkan kesenjangan daerah. Maka pemerintah menetapkan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Data PDRB dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu :

#### 1. pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit/ekonomi dalam suatu daerah pada suatu periode tertentu. Dikelompokkan menjadi 9 sektor, yaitu : a. pertanian, b. Pertambangan, c. Kontruksi, d. Listrik, Gas dan Air Bersih, e. Konstruksi, d. perdagangan, Hotel, dan Restoran, f. pengangkutan dan Komunikasi, g. keuangan , *Real Estate*, dan Jasa Perusahaan, h. jasa – jasa.

#### 2. Pendekatan pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Komponen permintaan akhir meliputi : pengeluaran kosumsi rumah tangga, pengeluaran kosumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran kosumsi



pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, dan perubahan inventori/stok, dan ekspor neto.

### 3. Pendekatan pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah pada jangka waktu tertentu. Komponen balas jasa faktor produksi, yaitu : upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Serata turunan produk domestik regional bruto (PDRB), yaitu :

#### 1. PDRB atas dasar harga pasar

Yaitu jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi disuatu daerah termasuk penyusutan dan pajak tidak langsung

#### 2. Produk Domestik Regional Neto (PDRN)

PDRN atas dasar harga merupakan PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan, penyusutan yang dimaksud adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam periode tertentu.

#### 3. PDRN atas dasar biaya faktor

Adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tidak langsung neto, pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah.

#### 4. PDRB perkapita

PDRB perkapita adalah PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Terdapat dua ukuran PDRB perkapita, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB atas dasar harga konstan (riil)

#### **2.2.3. Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan “. Menurut Warsito (2001) dalam damang (2011) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005) dalam damang (2001) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli yang bersumber dari hasil pajak daerah , hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan Undang - Undang nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah, pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak, yaitu iuran wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah,
2. Retribusi daerah, Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dirinci menjadi:
  - a) Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas: (1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
  - b) Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, (7) Pajak Parkir.
  - c) Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) Retribusi Perijinan Tertentu.

3. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah..
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah yang mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahanjasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

#### **2.2.4. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *blockgrant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap

Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Kafilah Dzikrullah).

Dalam masa peralihan dengan berlakunya PP No. 104 tahun 2000, pelaksanaan alokasi dana alokasi umum disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai ke daerah. Dana alokasi umum ini dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat yang dialihkan menjadi pegawai daerah. Dalam hal pegawai pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada daerah belum sepenuhnya menjadi beban daerah, pembayaran gaji pegawai tersebut diperhitungkan dengan dana alokasi umum bagi daerah yang bersangkutan. Jangka waktu masa peralihan adalah sampai dengan semua pegawai pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada daerah telah sepenuhnya menjadi beban daerah yang bersangkutan Abdul Halim dan Ibnu Mujib (2009) menerangkan bahwa dana alokasi umum ini dialokasikan berdasarkan suatu rumus yang memasukkan unsur potensi penerimaan daerah dan kebutuhan

objektif pengeluaran daerah dan dengan memperhatikan ketersediaan dana APBN

### **2.2.5 Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhannya, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun (Kafilah Dzikrullah).

Dalam hal lain dana alokasi khusus juga dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Dana alokasi khusus dapat juga disebut dana infrastruktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga

membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas. Menurut Adisasmita (2014), yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah :

a) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, misalnya :

- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain.
- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah pesisir/kepulauan.
- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

b) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional yang meliputi:

- Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi komitmen pemerintah dengan lembaga donor.
- Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Tahunan

Ketentuan tentang penyaluran DanaAlokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan pelaksanaan penyaluran dana

alokasi khusus ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kebijakan DAK secara spesifik antara lain:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah;
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata;
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur



5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup,serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupandan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastruktur;
6. Mendukung penyediaan prasarana didaerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan;
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD;
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan – kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum,Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

### **2.3. Hubungan antar variabel**

#### **2.3.1 Hubungan PDRB dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Hakim, Abdul (2002) HDI meringkas tiga variabel kesejahteraan, meliputi : umur yang panjang , pendidikan, dan stndar hidup. Indikator standar hidup dapat dilihat dari GDP/kapita. Sehingga

diasumsikan jika GDP/kapita meningkat dalam hal ini PDRB /kapita maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

### **2.3.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dengan Indeks Pembangunan**

#### **Manusia**

Menurut Abdullah dan Solichin (2006) dalam Lilis Setyo Wati dan Yohana Kus Suparwati (2012) dalam konteks otonomi daerah, PAD sebagai pengukur pendapatan daerah sendiri yang sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan fasilitas pelayanan masyarakat. PAD yang bersumber dari berbagai hasil barang dan jasa yang dikenakan pajak yang akan dialokasikan untuk pembangunan kesehatan yang masuk dalam retribusi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia.

### **2.3.3 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Indeks Pembangunan**

#### **Manusia**

Dana alokasi umum yang merupakan komponen dari Dana Perimbangan, Menurut Lilis Setyo Wati dan Yohana Kus Suparwati (2012) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiyai kebutuhan pengeluaran pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Hal ini didukung juga dengan pernyataan Decta Pitron (2013) yang menjelaskan bahwa DAU sering disebut bantuan tidak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan

jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah dapat menggunakan dana sesuai dengan kehendaknya dengan memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat atau untuk kepentingan lain yang bermanfaat. Namun demikian penggunaan dana tersebut haruslah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan aturan desentralisasi sebagai pengganti dari sistem sentralisasi yaitu otonomi daerah. Semakin tinggi dana alokasi umum maka akan semakin tinggi pelayan dari pemerintah dari pemerintah dalam hal tingkat hidup, tingkat pendidikan, dan tingkat kehidupan layak, otomatis hal tersebut meningkatkan indeks pembangunan manusia

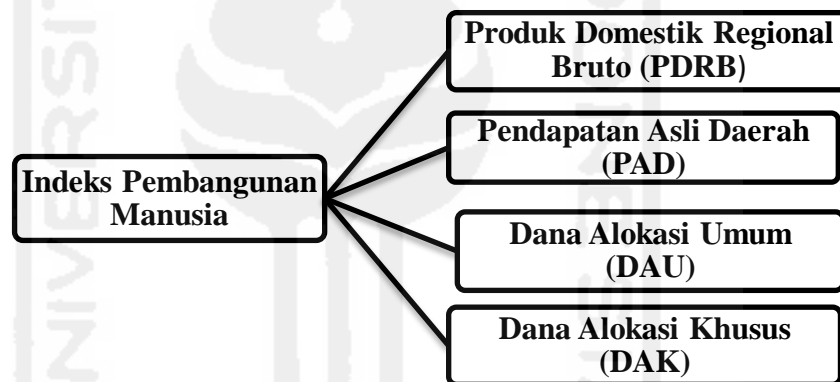
#### **2.3.4 Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Usman(2008) dalam Lilis Setyo Wati dan Kus Suparwati (2012), dalam kaitannya dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, fungsi dana alokasi khusus hanya menjadi pelengkap atau penambah dari unsur komponen dana perimbangan. Namun dalam perkembangannya, keberadaan DAK menjadi sangat penting bagi pembangunan dalam bentuk DAU pada umumnya hanya mencakup hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja birokrasi. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan DAK di daerah menjadi faktor yang penting dalam keseluruhan program pembangunan nasional pada umumnya. Semakin tinggi DAK maka bantuan

pemerintah dalam pemberian layanan kepada masyarakat akan meningkat yang otomatis akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

### 2.3.5. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian dalam studi ini menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi beberapa variabel diantara , yaitu:



Untuk mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, maka perlu dicari faktor-faktor yang mempengaruhi IPM Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian ini, faktor yang mempengaruhi IPM kabupaten/kota provinsi di Jawa Tengah antara lain : PDRB, PAD, DAU, DAK. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPM kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah, maka dapat

membantu pemerintah provinsi jawa tengah dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota di jawa tengah.

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan berbagai landasan teori yang di kemukakan, adalah merupakan salah satu kesimpulan dan argumentasi yang sifatnya sementara benar, sehingga dalam hal ini membutuhkan data-data hasil penelitian agar dapat dicari kebenarannya dan ditarik konsekuensi logis. Dalam penjelasan dapat dibuat beberapa hipotesis yang menjadi landasan dalam penelitian :

- 1) Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 2) Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 3) Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 4) Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)